

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD: DINAS PERDAGANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Lampiran : 24

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian maupun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	18.370.768.336,00	20.011.949.537,00	108,93
BELANJA	45.845.461.284,00	43.351.662.388,00	94,56
Surplus (defisit)	(27.474.692.948,00)	(23.339.712.851,00)	84,95

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	18.927.076.194,97	20.011.949.537,00	105,73
BELANJA	38.353.979.893,00	43.351.662.388,00	113,03
Surplus (defisit)	(19.426.903.698,03)	(23.339.712.851,00)	120,14

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 20.011.949.537 atau 108,93% dari target sebesar Rp 18.370.768.336 naik 105,73% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 18.927.076.194,97.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 43.351.662.388 atau 94,56% dari target sebesar Rp 45.845.461.284 naik 113,03% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 38.353.979.893.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar 0%, Retribusi Daerah sebesar 72,54%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 27,46%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 20.011.949.537 meningkat sebesar 105,73% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 18.927.076.194,97. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah	13.223.500.000,00	14.516.469.810,00	109,78	72,54
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang Sah	5.147.268.336,00	5.495.479.727,00	106,76	27,46
	Pendapatan Daerah	18.370.768.336,00	20.011.949.537,00	108,93	

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Pajak Daerah		-	
	Retribusi Daerah	14.788.378.613,00	14.516.469.810,00	98,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	
	Lain-lain PAD yang Sah	4.138.697.581,97	5.495.479.727,00	132,78
	Pendapatan Daerah	18.927.076.194,97	20.011.949.537,00	105,73

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94,92%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 41.152.060.189 meningkat sebesar 126,19% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 32.611.424.199.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 5,07%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.199.602.199 atau sebesar 87,73% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 2.507.237.250 meningkat sebesar 38,34% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5.736.555.694. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	43.338.224.034,00	41.152.060.189,00	94,96	94,93
	Belanja Pegawai	12.024.169.000,00	11.046.818.909,00	91,87	25,48
	Belanja Barang dan Jasa	31.314.055.034,00	30.105.241.280,00	96,14	69,44
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
2	Belanja Modal	2.507.237.250,00	2.199.602.199,00	87,73	5,07
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.022.920.250,00	1.916.964.199,00	94,76	4,42
	Belanja Gedung dan Bangunan	484.317.000,00	282.638.000,00	58,36	0,65
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja		45.845.461.284,00	43.351.662.388,00	94,56	100,00

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	32.611.424.199,00	41.152.060.189,00	126,19
	Belanja Pegawai	10.483.987.676,00	11.046.818.909,00	105,37
	Belanja Barang dan Jasa	22.127.436.523,00	30.105.241.280,00	136,05
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
2	Belanja Modal	5.736.555.694,00	2.199.602.199,00	38,34
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.718.768.694,00	1.916.964.199,00	33,52
	Belanja Gedung dan Bangunan	17.787.600,00	282.638.000,00	1.589,01
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya			
Jumlah Belanja		38.347.979.893,00	43.351.662.388,00	113,05

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.073.018.031,00	19.854.414.519,00	89,95	45,80
	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.308.500,00	13.308.500,00	100,00	0,03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.678.000,00	1.678.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.071.000,00	1.071.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.071.000,00	1.071.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.071.000,00	1.071.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.071.000,00	1.071.000,00	100,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.774.000,00	3.774.000,00	100,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.572.500,00	3.572.500,00	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.975.017.000,00	10.386.243.793,00	94,64	23,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.971.057.000,00	10.382.283.793,00	94,63	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunggulan SKPD	540.000,00	540.000,00	100,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	100,00	
Pengelolaan dan Penyitapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000,00	600.000,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	540.000,00	540.000,00	100,00	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	600.000,00	100,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	800.000,00	800.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.367.000,00	442.027.289,00	92,99	1,02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.539.500,00	105.834.200,00	92,40	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.886.000,00	24.531.200,00	91,24	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.615.500,00	78.097.850,00	98,09	
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.455.000,00	99,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.826.000,00	229.109.009,00	91,71	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.100.000,00	232.293.800,00	99,65	0,54
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.100.000,00	232.293.800,00	99,65	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.928.797.903,00	1.707.278.048,00	88,52	3,94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.886.000,00	11.882.500,00	99,97	
Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	1.356.336.919,00	1.272.821.548,00	93,84	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.574.984,00	422.574.000,00	75,38	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.171.910,00	1.432.995.424,00	93,53	3,31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.469.110,00	159.019.050,00	94,39	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	504.580.800,00	424.753.974,00	84,18	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.070.000,00	69.642.000,00	94,02	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	785.052.000,00	779.580.400,00	99,30	
Peningkatan Pelayanan BLUD	6.909.655.718,00	5.634.667.695,00	81,55	13,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.909.655.718,00	5.634.667.695,00	81,55	
1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	223.386.700,00	222.016.700,00	99,39	0,51

	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi/Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.386.700,00	222.016.700,00	99,39	0,51
	Pengawasan Distribusi/Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-)	223.386.700,00	222.016.700,00	99,39	
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	22.032.214.253,00	21.766.243.629,00	98,79	50,21
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.410.758.551,00	8.210.753.489,00	97,62	18,94
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.011.098.350,00	1.968.629.339,00	97,89	
	fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.399.660.201,00	6.242.124.150,00	97,54	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	13.621.455.702,00	13.555.490.140,00	99,52	31,27
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13.621.455.702,00	13.555.490.140,00	99,52	
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	266.775.200,00	266.747.000,00	99,99	0,62
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.478.200,00	22.478.000,00	100,00	0,05
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22.478.200,00	22.478.000,00	100,00	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	244.297.000,00	244.269.000,00	99,99	0,56
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	244.297.000,00	244.269.000,00	99,99	
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	310.921.100,00	310.489.890,00	99,86	0,72
	Pelaksanaan Metrologi Legal/berupa Tera/Tera Ulangan Pengawasan	310.921.100,00	310.489.890,00	99,86	0,72
	Pelaksanaan Metrologi Legal/berupa Tera/Tera Ulang	195.916.100,00	195.828.700,00	99,96	
	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	115.005.000,00	114.661.190,00	99,70	
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	939.146.000,00	931.750.650,00	99,21	2,15
	Pelaksanaan Promosi/Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	939.146.000,00	931.750.650,00	99,21	2,15
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	832.019.500,00	830.422.650,00	99,81	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	107.126.500,00	101.328.000,00	94,59	
	Jumlah Belanja	45.845.461.284,00	43.351.662.388,00	94,56	

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.381.348.643,00	19.854.414.519,00	114,23
	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.350.850,00	13.308.500,00	128,57
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.668.000,00	1.678.000,00	100,60
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.071.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.071.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.479.850,00	1.071.000,00	43,19
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	1.071.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.203.000,00	3.774.000,00	60,84
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.572.500,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.369.811.941,00	10.386.243.793,00	100,16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.369.811.941,00	10.382.283.793,00	100,12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	540.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1.080.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	600.000,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	600.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	-	540.000,00	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	600.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	600.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4.900.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	800.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	800.000,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	800.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	800.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	800.000,00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	800.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00	100,00
	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	800.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.567.490,00	442.027.259,00	197,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.293.100,00	105.834.200,00	206,33
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	24.531.200,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.589.050,00	78.097.850,00	151,38
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	4.455.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.685.340,00	229.109.009,00	189,84
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.186.500,00	232.293.800,00	246,63
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.186.500,00	232.293.800,00	246,63
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.459.721.611,00	1.707.278.048,00	116,96

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.295.000,00	11.882.500,00	115,42
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.042.020.328,00	1.272.821.548,00	122,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.406.283,00	422.574.000,00	103,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.142.950,00	1.432.995.424,00	174,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.773.900,00	159.019.050,00	110,60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.668.050,00	424.753.974,00	100,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.890.000,00	69.642.000,00	118,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.811.000,00	779.580.400,00	392,12
Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.400.767.301,00	5.634.667.695,00	128,04
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	46.865.000,00	222.016.700,00	473,74
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi/Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.865.000,00	222.016.700,00	473,74
Pengawasan Distribusi/Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	46.865.000,00	222.016.700,00	473,74
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	21.326.506.835,00	21.766.243.629,00	102,06
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.018.915.790,00	8.210.753.489,00	136,42
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.575.428.368,00	1.968.629.339,00	124,96
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.443.487.422,00	6.242.124.150,00	140,48
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	15.307.591.045,00	13.555.490.140,00	88,55
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13.743.548.600,00	13.555.490.140,00	98,63
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.564.042.445,00	-	-
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	252.744.528,00	266.747.000,00	105,54
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.065.000,00	22.478.000,00	93,41
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24.065.000,00	22.478.000,00	93,41
Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	228.679.528,00	244.269.000,00	106,82

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	228.679.528,00	244.269.000,00	106,82
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	235.754.433,00	310.489.890,00	131,70
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	235.754.433,00	310.489.890,00	131,70
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	200.120.383,00	195.828.700,00	97,86
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	35.634.050,00	114.661.190,00	321,77
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.290.676.183,00	931.750.650,00	72,19
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.290.676.183,00	931.750.650,00	72,19
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.171.611.183,00	830.422.650,00	70,88
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	119.065.000,00	101.328.000,00	85,10
	Jumlah Belanja	40.533.895.622,00	43.351.662.388,00	

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

HAMBATAN BERDASARKAN REALISASI BELANJA DI SETIAP KEGIATAN

1. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat realisasi belanja sebesar 94,64% dari target. Didalamnya terdapat belanja tunjangan dan belanja insentif yang realisasinya berada dibawah 90% dari target, hal ini dikarenakan realisasi sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.
2. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat realisasi belanja sebesar 88,52%. Di dalam kegiatan ini terdapat realisasi belanja yang realisasinya berada dibawah 80% dari target. Hal ini dikarenakan pembayaran retribusi sampah sudah sesuai dengan tagihan dari DLH.
3. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat realisasi belanja sebesar 93,53% dari target. Di dalamnya terdapat realisasi belanja yang berada dibawah 90%, hal ini dikarenakan ada kendaraan yang kondisinya masih bagus sehingga kerusakan dan penggantian peralatan sedikit, kemudian ada kendaraan yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai sehingga tidak ada penggantian peralatan, lalu truk sampah tidak setiap hari jalan.
4. Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdapat realisasi belanja yang berada dibawah 90%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja pegawai sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada, lalu realisasi pemeliharaan barang sudah sesuai dengan peralatan yang rusak, kemudian belanja modal peralatan dan mesin terdapat selisih dengan harga toko, dan jadi ada belanja modal gedung dan bangunan dikarenakan pembangunan connecting gedung tidak mendesak.
5. Pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat realisasi yang dibawah 90% dari target. Hal ini dikarenakan terdapat selisih pada harga toko.
6. Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan terdapat realisasi belanja dibawah 70%. Hal ini dikarenakan realisasi usang transport sudah sesuai dengan pedagang yang hadir.
7. Pada Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terdapat realisasi belanja yang berada di bawah 90%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan minat masyarakat yang memanfaatkan belanja promo cashback.

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	Retribusi Daerah	14.516.469.810,00	14.788.378.613,00
	Retribusi Jasa Umum	9.112.034.101,00	10.156.667.612,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	644.225.600,00	694.391.400,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	8.395.487.201,00	9.389.955.712,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	72.311.300,00	72.320.500,00
	Retribusi Jasa Usaha	5.404.445.709,00	4.631.711.001,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.094.760.709,00	2.198.369.501,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.309.685.000,00	2.433.341.500,00
	Lain-lain PAD yang Sah	5.495.479.727,00	4.138.697.581,97
	Pendapatan BLUD	5.495.479.727,00	4.138.697.581,97
	Pendapatan BLUD	5.495.479.727,00	4.138.697.581,97
	JUMLAH PENDAPATAN	20.011.949.537,00	18.927.076.194,97

Penjelasan :

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Retribusi Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 644.225.600 atau 104% dari target hal ini dikarenakan adanya pelunasan pembayaran tahun lalu, Retribusi Pelayanan Pasar dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 8.395.487.201 atau 107% dari target tahun 2023 hal ini dikarenakan penagihan piutang secara intensif, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 72.311.300 atau 100% dari target tahun 2023 hal ini dikarenakan proses pencraan dengan jemput bola. Kemudian terdapat Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 3.094.760.709 atau sebesar 122% dikarenakan optimalisasi pemanfaatan lahan, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan realisasi pendapatan Rp 2.309.685.000 atau sebesar 104% dari target tahun 2023 dikarenakan adanya pengelola baru.

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari pendapatan BLUD dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 5.495.479.727 atau 106% dari target tahun 2023 yang dikarenakan adanya promosi dan optimalisasi sewa lahan di UPT Pusat Bisnis.

3.1.2	Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	BELANJA DAERAH		
	BELANJA OPERASI	41.152.060.189,00	34.702.812.928,00
	Belanja Pegawai	11.046.818.909,00	10.885.143.519,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.134.296.837,00	5.199.865.730,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	3.757.494.163,00	3.804.464.400,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	352.723.983,00	348.456.120,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.670.000,00	179.400.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	126.560.000,00	126.174.820,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.540.000,00	134.360.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	216.028.860,00	215.884.020,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.289.711,00	43.645.044,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.901,00	53.481,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	302.070.505,00	305.986.688,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.716.127,00	7.860.244,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.148.587,00	23.580.913,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.584.977.311,00	4.537.523.505,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.232.754.760,00	1.217.229.395,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	195.810.402,00	179.286.719,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.307.227.523,00	1.315.116.171,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.849.184.626,00	1.825.891.220,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Per	663.009.645,00	632.422.706,00
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	663.009.645,00	632.422.706,00
	Belanja Pegawai BLUD	664.535.116,00	515.331.578,00
	Belanja Pegawai BLUD	664.535.116,00	515.331.578,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.105.241.280,00	23.817.669.409,00
	Belanja Barang	2.494.656.279,00	2.050.214.526,00
	Belanja Barang Pakai Habis	2.492.902.879,00	2.048.214.526,00

Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.753.400,00	2.000.000,00
Belanja Jasa	18.656.458.798,00	14.190.130.194,00
Belanja Jasa Kantor	17.274.367.998,00	12.211.790.011,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		396.149.683,00
Belanja Sewa Tanah	483.000.000,00	483.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	258.038.500,00	336.697.500,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	273.416.400,00	450.538.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	54.377.250,00	183.760.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	313.258.650,00	128.193.900,00
Belanja Pemeliharaan	2.245.932.614,00	1.658.734.675,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	479.471.224,00	346.431.450,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.575.524.400,00	1.135.110.225,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.936.990,00	145.090.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	32.103.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	398.100.009,00	229.443.415,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	398.100.009,00	229.443.415,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.052.009.400,00	2.119.636.750,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	20.000.000,00	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.032.009.400,00	2.119.636.750,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.258.084.180,00	3.569.509.849,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.258.084.180,00	3.569.509.849,00
BELANJA MODAL	2.199.602.199,00	5.830.282.694,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.916.964.199,00	5.806.495.694,00
Belanja Modal Alat Besar	65.632.000,00	52.722.000,00
Belanja Modal Alat Berat	65.632.000,00	52.722.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	573.500.000,00	5.147.894.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	573.500.000,00	5.147.894.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.765.000,00	9.995.570,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	8.050.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	1.445.570,00
Belanja Modal Alat Ukur	18.765.000,00	500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	314.055.000,00	170.171.750,00
Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	299.280.000,00	170.171.750,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.775.000,00	-
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	57.750.000,00	1.122.000,00
Belanja Modal Alat Studio	57.750.000,00	1.122.000,00
Belanja Modal Komputer	139.213.800,00	61.686.500,00
Belanja Modal Komputer Unit	135.263.800,00	61.686.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.950.000,00	-
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	52.978.000,00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	-	52.978.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	36.000.000,00	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	36.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	712.048.399,00	309.925.874,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	712.048.399,00	309.925.874,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282.638.000,00	17.787.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	282.638.000,00	17.787.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	282.638.000,00	17.787.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	6.000.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	6.000.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	6.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	43.351.662.388,00	40.533.095.622,00

Penjelasan :

Belanja Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar 91,87% dari target tahun 2023, ada belanja turjangan dan belanja iuran yang realisasinya dibawah 90% hal ini dikarenakan realisasi sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

Belanja Barang dan Jasa Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis yang realisasinya sebesar 96,53% dari target tahun 2023 yang disebabkan karena selisih harga toko, Belanja Barang Tak Pakai Habis yang realisasinya sebesar 79,12% dari target tahun 2023 disebabkan karena selisih harga toko, Belanja Jasa Kantor yang realisasinya sebesar 98,3% dari target tahun 2023 disebabkan karena sesuai dengan tagihan, Belanja Sewa Tanah dengan realisasi sebesar 100% hal ini dikarenakan tagihan setiap tahun tidak ada perubahan sesuai dengan serah terima, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan realisasi sebesar 99,77% dari target tahun 2023 atau sesuai dengan tagihan sewa, Belanja sewa Gedung dan Bangunan dengan realisasi sebesar 99,42% dari target tahun 2023 atau sesuai dengan tagihan sewa yang terdapat di toko, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dengan realisasi sebesar 90,63% dari target tahun 2023 atau sesuai dengan tagihan pihak konsultan, dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan realisasi sebesar 99,37% dari target tahun 2023 atau sesuai dengan tagihan dari pihak konsultan.

Kemudian pada Belanja Barang dan Jasa Juga terdapat Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan realisasi 91,46% dari target tahun 2023 hal ini disebabkan ada beberapa kendaraan yang baru sehingga biaya pemeliharaan tidak terlalu besar dan ada beberapa kendaraan yang tidak layak untuk digunakan sehingga tidak menggunakan anggaran untuk melakukan pemeliharaan, Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung dengan realisasi sebesar 99,25% atau sesuai dengan tagihan pemeliharaan, Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi dengan realisasi sebesar 99,45% dari target tahun 2023 atau sesuai dengan tagihan.

Pada Belanja Barang dan Jasa Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan realisasi sebesar 86% dari target tahun 2023 hal ini disebabkan karena uang transportasi ke pedagang sesuai dengan jumlah pedagang yang hadir, Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi 95,61%

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Modal Alat Bantu dengan realisasi 86,55% dari target tahun 2023 yang dikarenakan selisih harga toko, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dengan realisasi sebesar 99,74% dari target dikarenakan selisih harga toko, Belanja Modal Alat Ukur dengan realisasi sebesar 99,47% dari target tahun 2023 dikarenakan selisih harga toko, Belanja Modal Alat Kantor dengan realisasi sebesar 100% dari target tahun 2023, Belanja Modal Alat Rumah Tangga dengan realisasi sebesar 98,2% dari target tahun 2023 dikarenakan selisih harga toko, Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan realisasi 99,57% dari target tahun 2023 dikarenakan selisih harga toko, Belanja Modal Alat Studio dengan realisasi 99,57% dari target tahun 2023 dikarenakan adanya selisih harga toko, Belanja Modal Komputer Unit dengan realisasi sebesar 99,64% dari target tahun 2023 dikarenakan sesuai dengan harga toko, Belanja Modal Peralatan Komputer dengan realisasi 98,75% dari target tahun 2023 dikarenakan selisih harga toko, Belanja Modal Rambu-Rambu dengan realisasi 100% dari target tahun 2023, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dengan realisasi 89,01% dari target tahun 2023 dikarenakan sesuai harga toko.

Belanja Modal Bangunan dan Gedung Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan realisasi 99,41% dari target tahun 2023 atau sesuai dengan tagihan, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dengan realisasi sebesar 0% dari tahun 2023 yang disebabkan karena pembangunan connecting gedung tidak mendesak.

3.1.3

Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Retribusi Daerah	15.719.332.138,50	14.029.468.471,00
Retribusi Jasa Umum	10.314.886.429,50	9.397.757.470,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	644.225.600,00	694.391.400,00
Retribusi Pelayanan Pasar	9.598.249.529,50	8.631.045.570,00
Retribusi Pelayanan Tempat/Tempat Ulang	72.311.300,00	72.320.500,00
Retribusi Jasa Usaha	5.404.445.709,00	4.631.711.001,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.094.760.709,00	2.198.369.501,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.309.685.000,00	2.433.341.500,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.388.766.045,10	4.139.807.001,97
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	36.249.225,18	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	36.249.225,18	-
Pendapatan dari BLUD	5.352.516.819,92	4.139.807.001,97
Pendapatan dari BLUD	5.352.516.819,92	4.139.807.001,97
JUMLAH PENDAPATAN	21.108.098.183,60	18.169.275.472,97

Penjelasan :

Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan realisasi sebesar Rp 644.225.600, Retribusi Pelayanan Pasar dengan realisasi sebesar Rp 9.598.349.529,5 dengan selisih sebesar Rp 1.202.862.328,5 dari pendapatan LRA yang disebabkan karena adanya peninjauan piutang, Retribusi Tera/Tera Ulang dengan realisasi sebesar Rp 72.311.300, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp 3.094.760.709, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan realisasi sebesar Rp 2.309.685.000.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp 36.249.225,18 yang berasal dari denda piutang retribusi atas penyewaan lahan kios, los, serta pelataran, dan Pendapatan dari BLUD sebesar Rp 5.352.516.819,92 dengan selisih Rp 142.962.907,08 dari pendapatan BLUD di LRA yang berasal dari Pendapatan Diterima Dimuka BLUD.

3.1.4

Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
BEBAN DAERAH		
BEBAN OPERASI	40.816.379.079,00	35.835.330.293,31
Beban Pegawai	11.046.818.909,00	10.888.662.100,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.148.896.893,00	5.211.167.843,00
Beban Gaji Pokok ASN	3.757.494.163,00	3.804.464.400,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	352.723.983,00	348.456.120,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	171.670.000,00	179.400.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	126.560.000,00	136.174.820,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.540.000,00	134.360.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	216.028.860,00	215.884.020,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.159.625,00	44.531.528,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	54.901,00	53.481,00
Beban iuran Jaminan Kesehatan ASN	315.800.649,00	316.402.317,00
Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.716.127,00	7.860.244,00
Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.148.587,00	23.580.913,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.234.912.369,00	5.041.552.970,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	1.594.598.682,00	1.473.801.308,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	206.987.656,00	189.873.649,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.427.004.969,00	1.423.212.112,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.006.321.062,00	1.954.665.961,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	663.009.645,00	635.941.287,00
Beban insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	663.009.645,00	632.422.706,00
Beban insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	3.518.581,00
Beban Barang dan Jasa	29.769.560.170,00	24.946.668.193,31
Beban Barang	2.449.418.698,00	3.574.759.493,98
Beban Barang Pakai Habis	2.449.418.698,00	3.568.532.493,98
Beban Barang Tak Habis Pakai	-	6.227.000,00
Beban Jasa	21.327.381.480,00	16.207.992.803,33
Beban Jasa Kantor	19.835.537.180,00	14.174.106.320,00
Beban Sewa Tanah	257.500.000,00	633.333.333,33
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	299.488.500,00	336.697.500,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	273.416.400,00	450.538.500,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.800.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	327.510.750,00	283.472.600,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	332.128.650,00	329.844.550,00
Beban Pemeliharaan	3.515.677.885,00	2.775.686.051,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	718.864.768,00	586.324.721,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.390.891.127,00	1.996.237.630,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.921.990,00	159.020.500,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	32.103.000,00
Beban Perjalanan Dinas	425.072.707,00	268.593.095,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	425.072.707,00	268.593.095,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan	2.052.009.400,00	2.119.636.750,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	-

	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat	2.032.009.400,00	2.119.636.750,00
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.931.762.981,29	4.260.001.889,28
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.896.031.409,75	1.846.924.317,13
	Beban Penyusutan Alat Besar	378.926.423,87	429.838.980,96
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	59.443.625,99	429.838.980,96
	Beban Penyusutan Alat Bantu	319.482.797,88	-
	Beban Penyusutan Alat Angkutan	860.178.495,33	482.135.957,12
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	856.631.210,35	482.135.957,12
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.547.285,00	-
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Bengkel	49.500.703,98	69.370.586,98
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	12.879.689,98	-
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	16.907.014,00	69.370.586,98
	Beban Penyusutan Alat Ukur	19.514.000,00	-
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.512.500,00	1.512.500,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.512.500,00	1.512.500,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	321.964.078,53	364.464.717,36
	Beban Penyusutan Alat Kantor	20.050.999,97	364.464.717,36
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	276.311.578,56	-
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.601.500,00	-
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunitas dan Hiburan	106.429.813,44	112.766.766,88
	Beban Penyusutan Alat Studio	102.707.321,06	112.766.766,88
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	3.722.492,38	-
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.464.500,00	1.464.500,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	1.464.500,00	1.464.500,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	107.828.866,06	298.013.866,10
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	4.266.926,63	298.013.866,10
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktis Sekolah	20.754.200,01	-
	Beban Penyusutan Measuring/Testing Device	93.200,00	-
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	82.714.539,42	-
	Beban Penyusutan Komputer	65.854.600,00	86.256.441,73
	Beban Penyusutan Komputer Unit	52.731.125,00	86.256.441,73
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	13.123.475,00	-
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.571.428,52	-
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.571.428,52	-
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	1.100.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	1.100.000,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.000.281.133,02	2.380.406.734,50
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.997.830.253,02	2.377.955.854,50
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.997.830.253,02	2.377.955.854,50
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Identifikasi	2.450.880,00	2.450.880,00
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Identifikasi	2.450.880,00	2.450.880,00
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Bangunan	31.548.688,52	32.670.837,65
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.627.200,00	5.627.200,00
	Beban Penyusutan Jembatan	5.627.200,00	5.627.200,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air	24.652.206,80	25.774.355,93
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.885.012,10	25.774.355,93
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaliran Pasang Surut	989.640,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20.777.554,70	-
	Beban Penyusutan Instalasi	1.269.281,72	1.269.281,72
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.269.281,72	-
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	-	1.269.281,72
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.901.750,00	-
	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	3.901.750,00	-
	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	3.901.750,00	-
	JUMLAH BEBAN	45.748.142.060,29	40.095.332.182,59

Penjelasan realisasi :

Beban Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 terdiri dari Beban Operasi serta Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Operasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa. Beban Barang dan Jasa Memiliki Salinit Rp 335.681.310 yang disebabkan oleh jurnal penyesuaian beban persediaan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar Rp 4.931.762.981,29. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini tidak ada di LRA karena tidak mempengaruhi kas.

3.1.5

Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ASET LANCAR	5.983.224.067,65	3.934.430.017,86
Kas dan Setara Kas	1.623.199.414,16	1.762.387.382,16
Kas di BLUD	1.623.199.414,16	1.762.387.382,16
Piutang Retribusi Daerah	3.228.798.276,00	1.927.177.838,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	3.228.798.276,00	1.927.177.838,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	74.812.148,44	-
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	74.812.148,44	-
Penyisihan Piutang	(127.604.843,95)	(511.237.916,30)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(127.604.843,95)	(511.237.916,30)
Beban Dibayar Dimuka	457.500.000,00	232.000.000,00
Beban Dibayar Dimuka	457.500.000,00	232.000.000,00
Persediaan	726.519.073,00	524.102.714,00
Barang Pakai Habis	724.765.673,00	524.102.714,00
Barang Tak Habis Pakai	1.753.400,00	-
ASET TETAP	114.561.501.082,02	116.820.176.309,63
Peralatan dan Mesin	22.727.395.292,48	24.802.967.941,45
Alat Besar	5.761.643.810,90	5.703.711.301,70
Alat Angkutan	7.566.760.324,64	7.336.088.940,35
Alat Bengkel dan Alat Ukur	351.021.345,01	547.224.745,01
Alat Pertanian	55.065.000,00	55.065.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.488.300.456,90	5.169.078.760,02
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	823.305.973,23	931.732.477,20
Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.322.500,00	7.322.500,00
Alat Laboratorium	1.072.305.807,38	2.976.583.807,38
Komputer	1.562.370.074,42	2.072.880.409,79
Rambu-rambu	36.000.000,00	-
Peralatan Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00
Gedung dan Bangunan	186.594.699.693,50	186.673.999.093,20
Bangunan Gedung	186.472.155.693,50	186.551.455.093,20
Tugu Tink Kontrol/Pasti	122.544.000,00	122.544.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.140.997.091,93	1.140.997.091,93
Jalan dan Jembatan	281.360.000,00	281.360.000,00
Bangunan Air	821.558.640,80	821.558.640,80
Instalasi	38.078.451,13	38.078.451,13
Aset Tetap Lainnya	82.810.900,00	146.934.900,00
Bahan Perpustakaan	9.230.500,00	44.595.500,00
Barang Bercorak Kesentian/Kebudayaan	67.445.000,00	51.838.000,00
Hewan	2.000.000,00	4.000.000,00
Tanaman	4.135.400,00	46.501.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.787.000,00	181.139.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.787.000,00	181.139.000,00
Akumulasi Penyusutan	(96.002.188.895,89)	(96.125.861.626,95)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan M	(15.156.627.049,36)	(16.779.638.623,04)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Ba	(80.392.389.285,15)	(78.975.839.485,98)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan,	(397.472.811,38)	(370.383.517,93)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainya	(55.739.750,00)	-
ASET LAINNYA	125.454.500,00	125.454.500,00
Aset Tidak Berwujud	288.806.500,00	125.454.500,00
Aset Tidak Berwujud	288.806.500,00	125.454.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berw	(163.352.000,00)	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berw	(163.352.000,00)	
TOTAL ASET	120.670.179.649,67	120.880.060.917,49

Penjelasan :

Aset Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap

Saldo Aset Lancar Dinas Perdagangan sebesar Rp 5.983.224.067,65, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di BLUD tahun 2023 sebesar Rp 1.623.199.414,16 yang mengalami penurunan sebesar Rp 139.187.968 dari tahun 2022 yang disebabkan oleh kenaikan kebutuhan belanja UPT Pusat Bisnis.
2. Saldo Piutang 2023 terdiri dari Piutang retribusi Daerah sebesar Rp 3.228.798.276 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.301.620.438 dari saldo Piutang Retribusi Daerah tahun 2022, Piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 74.812.148,44 yang tahun sebelumnya tidak ada piutang lain-lain PAD yang Sah dan Penyisihan Piutang sebesar Rp 127.604.843,92 yang mengalami penurunan sebesar Rp 283.633.072,36.

Penyisihan piutang ditinjau berdasarkan umur piutang yang dirinci sebagai berikut:

- Kurang dari satu sampai dengan 1 bul	10.671.378,87
- Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 b	116.933.465,08
- Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan	
- Lebih dari 1 tahun	
Jumlah	127.604.843,95

- Saldo Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp 457.500.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 225.500.000 yang disebabkan karena perbedaan periode sewa.
- Persediaan tahun 2023 sebesar Rp 726.519.073 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 202.416.359 dari tahun 2022 yang disebabkan karena kenaikan kebutuhan atas barang persediaan.

Aset Tetap Dinas Perdagangan tahun 2023 sebesar Rp 114.606.246.467,79 terdiri dari:

Penambahan saldo aset tetap berasal dari mutasi terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	520.788.076,92
- Gedung dan bangunan	
- Jalan, irigasi dan bangunan	
- Aset tetap lainnya	
- Kontribusi dalam pengerjaan	
Jumlah	520.788.076,92

Penambahan saldo aset tetap berasal dari koreksi tahun lalu terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
- Gedung dan bangunan	1.637.771.436,30
- Jalan, irigasi dan bangunan	
- Aset tetap lainnya	
- Kontribusi dalam pengerjaan	
Jumlah	1.650.971.436,30

Pengurangan saldo aset tetap berasal dari mutasi terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	(2.284.681.092,63)
- Gedung dan bangunan	
- Jalan, irigasi dan bangunan	
- Aset tetap lainnya	
- Kontribusi dalam pengerjaan	
Jumlah	(2.284.681.092,63)

Pengurangan saldo aset tetap berasal dari Aset Rusak terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	(2.330.792.832,26)
- Gedung dan bangunan	(1.971.108.836,00)
- Jalan, irigasi dan bangunan	
- Aset tetap lainnya	
- Kontribusi dalam pengerjaan	
Jumlah	(4.301.901.668,26)

Pengurangan saldo aset tetap berasal dari Belanja Modal Masuk Ke Ekstrakomputabel terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	(3.773.000,00)
- Gedung dan bangunan	
- Jalan, irigasi dan bangunan	
- Aset tetap lainnya	
- Kontribusi dalam pengerjaan	
Jumlah	(3.773.000,00)

Pengurangan saldo aset tetap berasal dari Aset Rusak terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	(2.330.792.832,26)
- Gedung dan bangunan	(1.971.108.836,00)
- Jalan, irigasi dan bangunan	
- Aset tetap lainnya	
- Kontribusi dalam pengerjaan	
Jumlah	(4.301.901.668,26)

Aset Lainnya Dinas Perdagangan tahun 2023 sebesar Rp 288.806.500 terdiri dari:

Penambahan saldo Aset Lainnya karna reklas konstruksi dalam pembangunan

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
- Aset Tidak Berwujud	163.352.000,00
- Aset lain-lain	
Jumlah	163.352.000,00

Penambahan saldo Aset Lainnya karna aset rusak/usang terdiri dari:

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
- Aset Tidak Berwujud	
- Aset lain-lain	132.150.399,64
Jumlah	132.150.399,64

Pengurangan saldo Aset Lainnya karna penghapusan aset rusak/usang, terdiri dari:

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
- Aset Tidak Berwujud	
- Aset lain-lain	(132.150.399,64)
Jumlah	(132.150.399,64)

3.1.6

Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Pendapatan Diterima Dimuka	176.202.657,08	33.239.750,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pil	176.202.657,08	33.239.750,00
Utang Belanja	114.830.049,00	22.596.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	114.830.049,00	22.596.000,00
TOTAL KEWAJIBAN	291.032.706,08	55.835.750,00

Penjelasan :

Kewajiban Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Dibayar Dimuka dan Utang Belanja

Saldo Pendapatan Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp 176.202.657,08 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 142.962.907,08 dari tahun 2022

Saldo Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp 114.830.249 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 92.234.249 dari tahun 2022 yang disebabkan karena Utang Belanja tahun 2023 meliputi Utang Belanja Tagihan Telpon, Utang Belanja Tagihan Air, dan Utang Belanja Tagihan Listrik. Sedangkan tahun 2022 hanya Utang Belanja Tagihan air.

3.1.7

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
EKUITAS		
Ekuitas	96.184.181.290,80	120.824.225.167,49
Ekuitas	120.824.225.167,49	120.824.225.167,49
Surplus/Defisit-LO	(24.640.043.876,69)	
Ekuitas untuk Dikonolidasikan	23.200.524.883,00	-
RK PPKD	23.200.524.883,00	
Ekuitas Mutasi	994.440.569,79	-
Ekuitas Mutasi	994.440.569,79	
TOTAL EKUITAS	120.379.146.743,59	120.824.225.167,49

Penjelasan :

Saldo Ekuitas Awal 2023 sebesar Rp 120.824.225.167,49.

Saldo Surplus/Defisit 2023 sebesar - Rp 24.640.043.876,69.

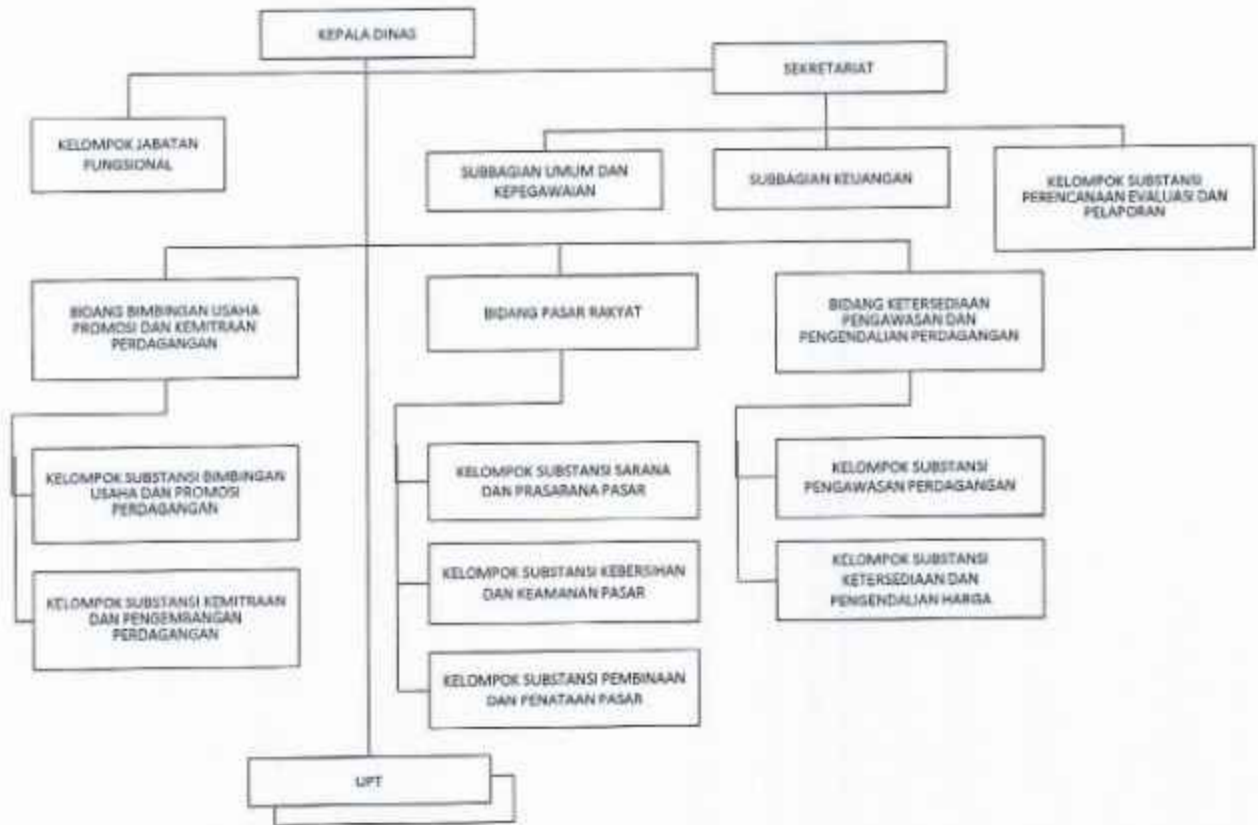
Saldo RK PPKD 2023 sebesar Rp 23.200.524.883.

Saldo ekuitas mutasi Dimas Perlagangan tahun 2023 sebesar Rp 994.440.569,79 yang terdiri dari

1. Ekuitas Mutasi Piutang tahun 2023 sebesar Rp 520.954.105,11 yang terdiri dari koreksi denda piutang tahun lalu sebesar Rp 38.543.556,76, koreksi piutang tahun lalu sebesar Rp 98.777.476,00, dan penyisihan piutang sebesar Rp 383.633.072,36.
2. Ekuitas Mutasi Aset tahun 2023 sebesar Rp 865.571.250,09 yang dikarenakan adanya mutasi masuk atau keluar aset tetap, entri aset tetap tahun lalu, dan penghapusan aset tetap.
3. Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar -Rp 259.935.385,77 yang disebabkan karena aset lama yang belum dimusutkan.
4. Ekuitas Mutasi Aset Lainnya sebesar Rp 132.150.399,64 yang dikarenakan penghapusan aset lainnya karena aset rusak/usang.
5. Ekuitas Mutasi Utang Belanja sebesar Rp 1.000 yang dikarenakan biaya admin yang seharusnya tidak dicantumkan.

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi



4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

4.2.1. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Tugas pokok kepala dinas ialah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Fungsi

Keapa dinas memiliki fungsi :

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan;
- h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.2. Sekretariat

Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;

- d. Membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- h. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- j. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n. Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- o. Pengoordinasian penyajian bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.2.a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Fungsi

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan surat-menyurat Dinas;
- d. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. Penyajian bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- j. Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
- l. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- m. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

4.2.2.b. Subbagian Keuangan

Tugas

Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- b. Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- c. Penatausahaan keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- f. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.2.c. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Tugas

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.

Fungsi

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- d. Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- e. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.3. Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan

Tugas

Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan.

Fungsi

Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha promosi dan kemitraan perdagangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha dan promosi perdagangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- f. Pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- h. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.3.a. Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan

Tugas

Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan bimbingan usaha perdagangan.

Fungsi

Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha dan promosi perdagangan;
- c. Pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
- d. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.3.b. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan

Tugas

Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan.

Fungsi

Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.4. Bidang Pasar Rakyat

Tugas Pokok

Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pasar rakyat.

Fungsi

Bidang Pasar Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pasar rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pasar Rakyat;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pembinaan dan penataan pedagang;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pasar Rakyat;
- h. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pasar Rakyat;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pasar Rakyat;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pasar Rakyat;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.4.a. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar

Tugas Pokok

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat.

Fungsi

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- f. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.4.b. Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar

Tugas

Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat.

Fungsi

Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan kebersihan dan keamanan sarana distribusi perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- f. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.4.c. Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar

Tugas

Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan penataan pasar.

Fungsi

Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan penataan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan pengelola pasar;
- e. Penyiapan bahan kebijakan teknis dan target pendapatan pasar;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan pasar;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pasar;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pedagang pasar;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- j. Pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, pengembangan inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;

- l. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.5. Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

Tugas

Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan.

Fungsi

Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan pengendalian harga;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- g. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.5.a. Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan

Tugas

Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pengawasan perdagangan.

Fungsi

Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan perdagangan;
- c. Pelaksanaan pengawasan perdagangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.5.b. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga

Tugas

Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan penjaminan ketersediaan dan pengendalian harga.

Fungsi

Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait ketersediaan dan pengendalian harga;
- c. Pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- d. Pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Pelaksanaan pengendalian inflasi Daerah di bidang perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- h. Pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Untuk menunjang ketagutan teknis, UPT Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.

4.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Bab V
Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
- 5.1.1 Pendapatan**
- 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah**
Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 20.011.949.537 atau 108,93% dari target Rp 18.370.768.336 yang
- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0 atau 0% dari target;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 14.518.469.810 atau 109,77% dari target;
 - 3) Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0 atau 0% dari target;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5.493.479.727 atau 106,76% dari target.
- 5.1.2 Belanja**
Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 43.351.662.388 atau 94,56% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
- 5.1.2.a Belanja Operasi**
Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 41.152.060.189 atau sebesar 94,95% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 12.024.169.000 terealisasi sebesar Rp 11.046.818.909 atau 91,87% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 31.314.055.034 terealisasi sebesar Rp 30.105.241.280 atau sebesar 96,13% dari anggaran.
- Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 0 terealisasi Rp 0 atau 0% dari anggaran.
Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 0 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran.
- 5.1.2.b Belanja Modal**
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 2.199.602.199 atau 87,73% dari anggaran.
Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.
- 5.2 Neraca**
- 5.2.1 Aset**
Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 120.670.179.649,67 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 5.983.224.067,65, Aset Tetap sebesar Rp 114.561.501.082,02 dan Aset Lainnya sebesar Rp 125.454.500.
- 5.2.2 Kewajiban**
Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 291.032.906,08, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
- 5.2.3 Ekuitas**
Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 120.379.146.743,59.
- 5.3 Laporan Operasional**
- 5.3.1 Pendapatan-LO**
Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp 21.108.098.183,6 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 21.108.098.183,6.
- 5.3.2 Beban-LO**
Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 45.748.142.060,29 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 40.836.379.079, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp 4.931.762.981,29.
- 5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**
Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp -24.640.043.876,69.
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**
- 5.4.1 Ekuitas Awal**
Ekuitas awal sebesar Rp 120.824.225.167,49 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.
- 5.4.2 Surplus/Defisit LO**
Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp -24.640.043.876,69 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.
- 5.4.3 Ekuitas Mutasi**
Ekuitas Mutasi sebesar Rp 994.440.569,79 terdiri dari Ekuitas Mutasi Pinang, Ekuitas Mutasi Aset Tetap, Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan, Ekuitas Mutasi Aset Lainnya, dan Ekuitas Mutasi Utang Belanja.
- 5.4.4 Ekuitas Akhir**
Ekuitas akhir sebesar Rp 120.379.146.743,59 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

Yogyakarta, 31 Desember 2023


(VERONICA AMBAR LEMUWARDANI, S.I.P.)
NIP. 196912031989032002